

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat (Satjipto Raharjo, 2009:111). Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, polisi memegang peran sentral dalam masyarakat. Sebagaimana Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 dalam BAB II Pasal 6 Ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

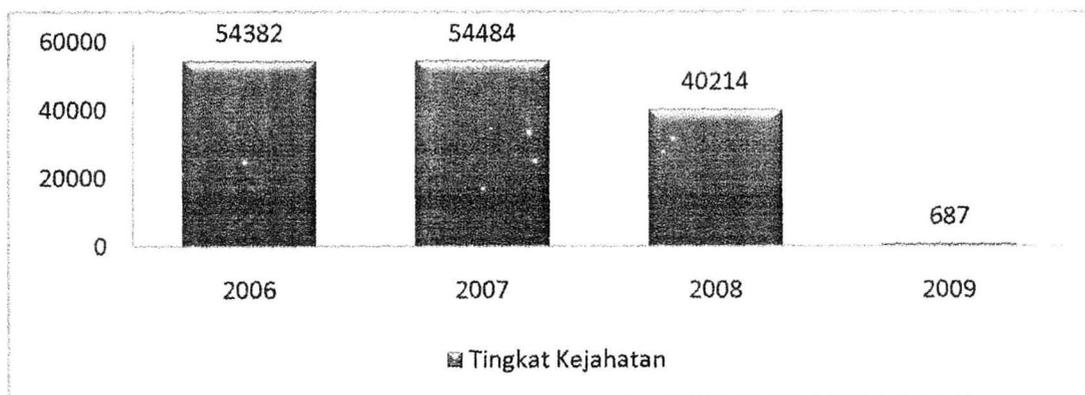
Namun sering terdengarpendapat masyarakat terhadap pola kinerja Kepolisian yang masih kurang efektif, dikarenakan penyalahgunaan kewenangan yang selalu menjadi pemberitaan oleh media massa. Tidak sedikit petugas Polri yang terlibat dalam tindak pidana hukum maupun perdata, tindak kriminal, kekerasan, pemerasan, bahkan korupsi dan tidak sedikit pula yang terekspos di media sehingga masyarakat menjadi tahu pemberitaan negatif tentang kepolisian. Walaupun ada lembaga seperti Komisi Kepolisian Nasional yang berwenang menerima saran dan keluhan masyarakat mengenai kinerja kepolisian (sesuai

dengan Peraturan Presiden No. 17/2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional), namun citra itu perlu dibentuk dengan mandiri oleh kepolisian itu sendiri. Pencitraan positif yang seharusnya dibangun sebagai komitmen menuju profesionalisme polisi, ternyata sering disalah gunakan oleh oknumnya sendiri sehingga polisi sering divonis dengan citra negatif. Dari pencitraan negatif tersebut masyarakat membentuk berbagai opini.

Dengan kata lain, instansi kepolisian perlu membangun dan menjaga citranya di masyarakat. Citra ini menjadi lebih mendesak sejak bangsa Indonesia memasuki era reformasi. Dari pembentukan citra di benak masyarakat tersebut sangat berpengaruh dalam pembentukan opini oleh publik. Karena opini publik merupakan pendapat masyarakat yang nantinya akan tersebar luas, apalagi opini tersebut berhubungan dengan citra polisi. Sebuah institusi publik seperti polisi atau Polri, yang ingin dapat bekerja secara efektif, membutuhkan legitimasi dari masyarakat dimana ia bekerja.

Polri juga memiliki slogan yang berbunyi “Melindungi dan Mengayomi Masyarakat”, namun berdasarkan *Global Corruption Barometer (GBC) 2007*, citra organisasi ini dipersepsikan kian luntur di mata publik. Menurut data statistik dari reskrim Polriakan kejahatan wilayah hukum Polda Metro Jaya dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Peningkatan kejahatan terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar 54484 dari 54382 kasus pada tahun 2006. Pada tahun 2008, kasus kejahatan turun menjadi 40214 kasus, dan tahun 2009 kasus kejahatan kembali mengalami penurunan menjadi 687 kasus.

Grafik Statistik Kasus Kejahatan



Sumber: *Informasi Statistik*. (2012). <http://reskrimum.metro.polri.go.id/statistik>

Menurut Amriël (2012), menurunnya data statistik kejahatan dari tahun ke tahun dapat disebabkan keengganan masyarakat untuk melaporkan kasus yang dihadapi kepada pihak kepolisian. Hal tersebut diakibatkan karena kurangnya kepercayaan publik terhadap kinerja aparat kepolisian dan kekhawatiran akan banyaknya jatuh korban pada kasus-kasus berikutnya (dalam Barton, 2011).

Laporan mengenai penurunan tingkat kejahatan merupakan salah satu bentuk ketidakpuasan publik terhadap kinerja aparat kepolisian (Decker dalam Brown, 2002). Ketidakpercayaan publik terhadap kinerja aparat kepolisian akan berdampak pada kemampuan aparat kepolisian dalam menangani kasus kejahatan. Keengganan publik untuk melaporkan kejahatan dapat berdampak pada menurunnya evaluasi kinerja aparat kepolisian (Percy, Reisig, & Giacomazzi dalam Brown, 2002). Dengan demikian, persepsi negatif publik terhadap kinerja polisi dapat berkontribusi pada menurunnya efektifitas peran aparat kepolisian, meningkatnya tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap kinerja polisi.

Kapolri sendiri telah menyampaikan dalam Siaran Pers di Akhir Tahun 2010, bahwa terdapat pelanggaran disiplin sebanyak 5.437 perkara, pelanggaran pidana sebanyak 682 perkara serta pelanggaran etik sebanyak 215 perkara. Data ini menunjukkan bahwa pelanggaran disiplin, pidana dan etik masih tinggi. Pelanggaran HAM masih dilakukan anggota Polri dengan cara melakukan penyiksaan dan penangkapan sewenang-wenang terhadap masyarakat sipil khususnya dalam penanganan konflik tanah, modal, penggunaan kekuatan yang berlebihan, khususnya dalam upaya pemberantasan terorisme; kriminalisasi terhadap masyarakat, rekayasa kasus bahkan pembiaran terhadap pertemuan-pertemuan sebagai ekspresi dari kebebasan berpendapat.

Polri juga masih diwarnai oleh hal-hal yang bersifat negatif. Salah satu contoh yaitu maraknya aksi kekerasan yang melibatkan oknum polisi, di mana sepanjang tahun 2010–Juni 2011 tercatat 85 kali peristiwa kekerasan dengan jumlah korban sebanyak 373 orang. Bahkan secara jujur harus diakui bahwa masih ada berbagai macam kasus kekerasan yang dilakukan anggota polisi yang tidak dipublikasikan. Berikut ini akan disajikan salah satu contoh negatif dalam

bentuk data tabel kekerasan yang dilakukan oleh anggota Polri pada tahun 2010- Juni 2011 adalah sebagai berikut :

TABEL KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI

Tahun 2010 – Juni 2011

Tahun	Tahun 2010		Tahun 2011		Total	
	Korban	Peristiwa	Korban	Peristiwa	Jumlah korban	Jumlah peristiwa
Tindakan kekerasan						
Penyiksaan	27	18	4	3	31	21
Penganiayaan	76	11	40	5	116	16
Penembakan	84	16	28	8	112	24
Pelecehan seksual	0	0	2	2	2	2
Intimidasi	1	1	10	2	11	3
Penangkapan sewenang-wenang	70	15	31	4	101	19
Total	258	61	115	24	373	85

Sumber: <http://www.kontras.org>

Dari berbagai aksi kekerasan yang telah disajikan di atas, memperlihatkan kegagalan polisi dalam mengimplementasikan nilai-nilai Tri Brata dan Catur Prasetya yang telah dinyatakan dalam komitmen bersama yaitu “dengan penuh kesadaran melaksanakan tugas kepolisian yang anti KKN dan anti kekerasan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”. Selain itu aksi kekerasan di atas menghambat institusi Polri untuk meningkatkan keunggulan kompetitif melalui pelayanan prima polisi terhadap masyarakat.

Kasus lain adalah penusukan seorang pemuka agama di Cikeuting Bekasi karena Polri membiarkan kelompok kekerasan melakukan aksi berkali-kali untuk menolak pendirian Gereja. Polisi yang seharusnya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan

pelayanan kepada masyarakat pada kenyataannya masih membiarkan tindak kekerasan yang terjadi di masyarakat. Hal tersebut menggambarkan citra negatif kinerja kepolisian.

Sementara itu, dalam apel persiapan menyambut Hari Bhayangkara di Polresta Bekasi Kota seorang pimpinannya menyatakan bahwa selama ini citra anggota polisi kurang baik di masyarakat, para anggota di himbau agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat memperburuk citra Polri, sebaliknya memperkaya dan memperkuat nilai-nilai kejuangan insan Bhayangkara sebagai prestasi yang tercatat dalam sejarah bangsa. Hal ini mengindikasikan bahwa pimpinan Polresta Bekasi Kota mengakui adanya citra negatif pada anggota polisi yang diberikan oleh masyarakat. Pimpinan Polresta Bekasi Kota berupaya untuk memotivasi para anggotanya untuk memiliki komitmen organisasi yang tinggi, sehingga dapat memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Dalam wawancara pendahuluan terhadap 2 orang anggota polisi, keduanya menyatakan citra Polri yang kurang baik. Mereka mengatakan citra Polri yang tidak baik terjadi karena adanya oknum anggota Polisi yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya seperti adanya aksi kekerasan yang melibatkan oknum polisi. Salah satu anggota polisi yang peneliti wawancara menyatakan citra anggota Polisi yang tidak baik di masyarakat membuatnya kurang peduli pada pekerjaannya. Hal tersebut dapat menjadi indikasi bahwa citra anggota Polisi yang tidak baik dapat mempengaruhi keterlibatan kerja anggotanya.

Menurut Kreitner dan Kinicki (2010:85) persepsi adalah merupakan proses kognitif yang memungkinkan kita menginterpretasikan dan memahami sekitar kita. Dikatakan pula sebagai proses menginterpretasikan suatu lingkungan. Individu yang berbeda akan melihat hal yang sama dengan cara yang berbeda. Peran persepsi dipandang penting yaitu bagaimana masyarakat menilai kinerja polisi dalam menjalankan tugas yang dapat membentuk citra positif maupun negatif Polri.

Seseorang dalam menjalankan atau melaksanakan pekerjaannya harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan masalah-masalah. Menurut Hurlock (dalam Afiatin, 2001) persepsi seseorang terhadap

sikap orang lain terhadap dirinya adalah lebih penting dari pada sikap orang lain itu sendiri.

Dalam lingkungan organisasi, persepsi terhadap pandangan orang lain mempunyai pengaruh didalam menentukan hasil kerja seseorang. Adanya pelaksanaan terhadap tugas, akan menimbulkan penilaian dari orang lain terhadap tugas yang disampaikannya. Jika penyelesaian tugas berbeda dari harapan orang lain maka akan menimbulkan kesan buruk atau ketidakpercayaan terhadap orang yang melaksanakan tugas tersebut. Persepsi ini sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku. Jika seseorang yang bekerja dalam situasi yang mendukung dan menerima pekerjaannya dengan senang hati akan menyebabkan orang tersebut terlibat dan berprestasi dalam pekerjaannya.

Menurut Assael (Rohmani, 2002) citra adalah persepsi total terhadap suatu obyek yang merupakan hasil pengolahan informasi yang didapatkan individu dari berbagai sumber dari waktu ke waktu. Dimana masyarakat berperan penting dalam menilai perilaku anggota polisi karena tidak lepas dari tugas polisi sebagai pelayan masyarakat sehingga keberadaan polisi sangat mudah disoroti terutama apabila ada kekurangannya. Dengan melihat hal tersebut perkembangan citra tergantung pada hubungan sosial dan merupakan proses yang panjang dan sering atau tidak menyenangkan karena terkadang citra yang diproyeksikan tidak selalu positif.

Citra suatu lembaga menjadi mudah terbentuk karena banyaknya anggota masyarakat yang menaruh harapan terhadap lembaga tersebut sehingga kinerja lembaga tersebut banyak mendapat perhatian. Hasil interaksi antara harapan dan kinerja itulah yang membuahkan citra. Sifat – sifat pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang bisa menimbulkan persepsi dalam dirinya bahwa pekerjaan yang dilakukannya bisa menyenangkan namun juga bisa tidak menyenangkan orang lain.

Cascio (2006) mengemukakan bahwa keterlibatan secara penuh terhadap pekerjaan membuat karyawan akan menciptakan kinerja yang baik dan akan berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan pekerjaan atau tugasnya karena hal ini dianggap penting. Seorang anggota Polri yang mempunyai keterlibatan kerja adalah seseorang yang identitas dirinya dipengaruhi oleh pekerjaannya sehingga

akan bertanggung jawab dalam pekerjaannya, menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat, sadar betapa bernilainya pekerjaan sebagai polisi sehingga akan mendorong timbulnya suatu kebanggaan profesi.

Dinamika terjadinya keterlibatan kerja yang tinggi pada seorang polisi ditentukan dengan adanya harapan yang sangat besar terhadap pekerjaannya, yaitu karena pekerjaannya adalah bagian penting dari hidupnya, sehingga kejadian-kejadian penting yang terjadi pada pekerjaannya dianggap berharga bagi kehidupannya.

Pekerja yang memiliki tingkat keterlibatan yang tinggi sangat memihak dan benar-benar peduli dengan bidang pekerjaan yang mereka lakukan. Seseorang yang memiliki keterlibatan kerja yang tinggi akan melebur dalam pekerjaan yang sedang ia lakukan. Tingkat keterlibatan kerja yang tinggi juga dapat menurunkan jumlah ketidakhadiran karyawan (Robbins, 2009: 306).

Hasil penelitian yang dilakukan Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian, Universitas Gadjah Mada (Litpol, 2006) mengemukakan bahwa penegakkan keamanan, perlindungan pada masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan polisi dinilai masih rendah karena kehadiran aparat Polri dinilai dengan pungutan (resmi atau tidak resmi) dan perlindungan pada praktek amoral dan masyarakat menilai bahwa pelayanan Polri dirasakan tidak mempermudah, melainkan mempersulit. Yang terbayang dalam benak masyarakat ketika berurusan dengan polisi adalah pungutan liar, prosedur yang berbelit-belit, pelayanan yang tidak transparan, sikap membeda-bedakan dan sambutan yang tidak ramah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut tampak jelas keterlibatan kerja polisi masih rendah dan jauh dari harapan masyarakat.

Cascio (2006) mengemukakan bahwa keterlibatan secara penuh terhadap pekerjaan membuat karyawan akan menciptakan kinerja yang baik dan akan berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan pekerjaan atau tugasnya karena hal ini dianggap penting. Karyawan akan lebih merasa puas dan senang jika bisa menghabiskan sebagian besar waktu, tenaga, dan pikiran untuk pekerjaannya.

Keterlibatan kerja dapat dipengaruhi oleh dua variabel, yaitu variabel personal dan variabel situasional (Kanungo, 1982). Variabel personal yang dapat

mempengaruhi keterlibatan kerja meliputi variabel demografi dan psikologis. Variabel demografi mencakup usia, pendidikan, jenis kelamin, status pernikahan, jabatan, dan senioritas.

Variabel situasional yang dapat mempengaruhi keterlibatan kerja mencakup pekerjaan, organisasi, dan lingkungan sosial budaya. Variabel pekerjaan mencakup karakteristik/hasil kerja, variasi, otonomi, identitas tugas, feedback, level pekerjaan (status formal dalam organisasi), level gaji, kondisi pekerjaan (work condition), Jobsecurity, supervisi, dan iklim interpersonal. Faktor-faktor seperti otonomi, hubungan pertemanan, perilaku pengawas, kepercayaan, dan dukungan menuntun pada keterlibatan kerja yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa persepsi citra yang merupakan bentuk kepercayaan dari masyarakat terhadap anggota Polri dapat menjadi bagian yang penting untuk dapat meningkatkan keterlibatan kerja.

Berdasarkan yang telah diuraikan diatas sangat menarik untuk diteliti karena diasumsikan bahwa peran persepsi anggota Polri terhadap citra yang diberikan masyarakat kepada Polri dipandang penting karena berguna untuk mengevaluasi diri pribadi dan mengembangkan nilai-nilai serta pandangan yang diperoleh dari lingkungan sosialnya. Maksudnya adalah Polri yang bertugas sebagai penegak hukum juga dituntut untuk menjalankan fungsi sosial yaitu bagaimana polisi melihat diri mereka sendiri dalam menunaikan tugas pokoknya atau yang disebut penilaian diri sendiri yaitu bagaimana anggota Polri memandang pekerjaannya dan dihubungkan dengan kondisi dirinya dan pandangan masyarakat terhadap dirinya. Penilaian seseorang atau sikap seseorang di dalam hubungannya dengan pekerjaan merupakan hal yang mendorong seseorang dalam aktivitas kerjanya. Seseorang yang bekerja sebagai polisi dan mempunyai persepsi positif terhadap pekerjaannya dapat mempengaruhi keterlibatan kerjanya.

1.2 Identifikasi Masalah

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Kendati Polri memiliki slogan yang berbunyi “Melindungi dan Mengayomi Masyarakat”,

namun berdasarkan *GlobalCorruptionBarometer* (GBC) 2007, citra organisasi ini dipersepsikan kian luntur di mata publik.

Keterlibatan kerja sangat penting bagi anggota Polri. Salah satu hal yang dapat mempengaruhi keterlibatan kerja adalah persepsi terhadap citra Polri. Sikap terhadap pekerjaan mempengaruhi perilaku kerja dengan memandang citra yang diberikan orang lain kepada seseorang dan bagaimana seseorang memandang pekerjaannya dan dihubungkan dengan kondisi dirinya dan pandangan orang lain terhadap seseorang.

Keterlibatan kerja anggota polisi dipengaruhi oleh persepsi terhadap citra Polri. Anggota Polri yang terlibat dalam pekerjaan memandang pekerjaan dengan sangat serius, mempertaruhkan nilai dan identitas dirinya pada pekerjaan sehingga ia mampu menilai dirinya berdasarkan peranannya dalam bekerja yang didapat dari umpan balik lingkungannya yaitu masyarakat. Dengan permasalahan di atas peneliti ingin mengetahui sejauhmana hubungan antara persepsi anggota Polri terhadap citra polisi dengan keterlibatan kerja pada anggota Polri.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

- a. Keterlibatan kerja yaitu derajat dimana orang dikenal dari pekerjaannya, berpartisipasi aktif didalamnya, dan menganggap prestasinya penting untuk harga diri .
- b. Persepsi terhadap citra Polisi merupakan proses pengorganisasian dan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat berdasarkan informasi, kesan dan kepercayaan yang didapatnya.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah "Apakah ada hubungan antara persepsi citra Polri dengan keterlibatan kerja anggota Polri?"

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antarpersepsi citra Polri dengan keterlibatan kerja anggota Polri

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

- a. Manfaat penelitian secara teoritis adalah agar hasil penelitian dapat menambah referensi ilmiah bagi perkembangan Psikologi
- b. Manfaat penelitian secara praktis adalah agar penelitian ini dapat bermanfaat untuk institusi dalam meningkatkan kinerjanya.

